

DAFTAR PUSTAKA

- Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat. (2011). *Dispenda dalam Angka: Selayang Pandang Perkembangan Dinas Pendapatan provinsi Jawa Barat*.
- Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat. (2009). *Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 33 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat*.
- Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat. (2001). *Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pajak Kendaraan Bermotor*.
- Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat. (2001). *Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2001 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor*.
- Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat. (2010). *Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 75 Tahun 2010 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Tahun 2010*.
- Erly, Suandy. (2008). *Edisi empat: Hukum Pajak*. Salempa Empat. Yogyakarta.
- Imam, Ghozali. (2009). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Cetakan Keempat. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Jogiyanto, Hartono. (2007). *Metodologi Penelitian Bisnis: Salah Kaprah dan Pengalaman-Pengalaman*. Edisi 2007. BPFE. Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2009). *Perpajakan Edisi Revisi 2009*. Andi. Yogyakarta.
- Meliala, T. S. Francisca Widiyanti Oetomo. (2010). *Edisi enam: Perpajakan dan Akuntansi Pajak*. Semesta Media. Jakarta.
- Nur, Indrianto., dan Bambang, Supomo. (2002). *Edisi Pertama: Metodologi Penelitian Bisnis*. BPFE. Yogyakarta.
- Siti, Resmi. (2009). *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Salemba Empat. Jakarta.

Sri, Watini. (2010). *Pengaruh Pemungutan Pajak Reklame terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kota Bandung: Studi Empirik pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung*. Ekonomi Akuntansi. Universitas Kristen Maranatha. Bandung

Suharsimi, Arikunto. (2006). *Edisi revisi VI: Prosedur Penelitian*. Rineka Cipta. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2010 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.